

Judul : Soroti dana mengendap Rp 234 T di Bank, senayan desak Pemda kebut realisasi anggaran
Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Soroti Dana Mengendap Rp 234 T Di Bank

Senayan Desak Pemda Kebut Realisasi Anggaran

Senayan menyoroti dana Pemerintah Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia mengendap di perbankan sebesar Rp 234 triliun. Dana yang terlalu lama mengendap tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, justru menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah.

ANGGOTA Komisi II DPR Eka Widodo mendesak Pemda untuk segera mempercepat realisasi anggaran. "Dana sebesar itu seharusnya segera dibelanjakan untuk program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Edo sapaan akrabnya, Selasa (21/10/2025).

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya dana Pemda sebesar Rp 234 triliun yang mengendap di bank. Kondisi tersebut menandakan uang daerah belum terserap optimal. "Sehingga tidak berdampak maksimal pada ekonomi dan pembangunan di daerah," ujar Purbaya di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Edo melanjutkan, jangan sampai APBD hanya menjadi angka di atas kertas tanpa realisasi nyata di lapangan. Percepatan

penyerapan anggaran daerah sangat penting untuk menjaga sirkulasi ekonomi lokal. Utamanya di sektor-sektor produktif seperti pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan infrastruktur dasar.

Selain itu, ia mendukung langkah Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang secara aktif memantau dan mengawasi penyerapan anggaran Pemda. Kebijakan pengawasan itu sejalan dengan semangat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik.

"Pemerintah pusat memang harus aktif memastikan dana yang ditransfer ke daerah tidak menganggur di perbankan, tetapi benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat," ujar politikus PKB ini.

Edo menambahkan, realisasi anggaran yang cepat dan tepat

sasaran bukan hanya soal administrasi, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan politik Pemda untuk menyejahterakan masyarakat. Sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen utama pembangunan daerah.

"Kalau tidak dijalankan dengan serius, masyarakat yang dirugikan. Ekonomi daerah tak bergairah," kata Legislator asal Jawa Tengah (Jateng) ini.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai, data Bank Indonesia (BI) terkait dengan besaran dana Pemda yang mengendap di bank senilai Rp 233 triliun, tidak valid. Pasalnya, berdasarkan temuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terdapat selisih sekitar Rp 18 triliun antara angka riil kas daerah dengan data BI.

"Ada sedikit perbedaan antara data BI yang Rp 233 triliun dengan data melalui rekening yang kami cek masing-masing. Totalnya Rp 215 triliun. Jadi lebih kurang beda Rp 18 triliun," kata Tito di Kantor Kemendagri, Senin (20/10/2025).

Menurut Tito, perbedaan utamanya terletak pada APBD di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel). Total uang yang parkir di bank mencapai Rp 5,16 triliun. Padahal, pendapatan kota tersebut tak sampai Rp 5 triliun. "Jadi kami juga melakukan checking ke kas masing-masing Pemda," ujar mantan Kapolri ini.

Tito menyebutkan salah satu alasan pengendapan dana tersebut akibat sejumlah Pemda yang lambat dalam belanja. Diketahui, berdasarkan data BI, terdapat Rp 233,97 triliun uang yang parkir di bank. Rinciannya giro senilai Rp 178 triliun, Simpanan Pemda atau deposito senilai Rp 48 triliun, dan tabungan senilai Rp 7,43 triliun.

Sementara dana mengendap paling banyak berasal dari kabupaten, yang mencapai Rp 134,26 triliun. Sementara uang provinsi yang masih parkir senilai Rp 60,20 triliun, dan kota senilai Rp 39,51 triliun.

Sedangkan, menurut temuan Kemendagri senilai Rp 215 triliun. Rinciannya dana mengendap milik provinsi senilai

Rp 64,95 triliun, kabupaten Rp 119,92 triliun, dan kota senilai Rp 30,13 triliun.

Selanjutnya, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan dana simpanan tertinggi di perbankan per September 2025, yakni senilai Rp 14,68 triliun, sedangkan yang terendah di Sulawesi Barat (Sulbar) senilai Rp 150 miliar.

Sementara, kabupaten dengan simpanan Pemda di bank terbesar berada di Bojonegoro senilai Rp 3,6 triliun. Kemudian untuk kota, tercatat Banjarbaru dengan simpanan mencapai Rp 5,16 triliun.

Sementara, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengaku bingung karena ada selisih pencatatan dana yang mencapai Rp 18 triliun antara BI dan Kemendagri. Sebab data BI pasti mengikuti data bank di seluruh Indonesia.

"Kalau dana kurang Rp 18 triliun, mungkin Pemda kurang teliti ngitung atau nulisnya. Karena kalau BI sudah di sistem semuanya," kata Purbaya saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, di Kemendagri, Senin (20/10/2025). ■ TIF